



**Laporan Kinerja Triwulan 1
Balai Bahasa Jawa Timur
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Bahasa Jawa Timur selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik				
[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	64	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	19	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia				
[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	41	Persen	0	0
[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	60	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan				
[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	59,93	Persen	0	0
[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kerjanya	50	Persen	0	0
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra				
[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11,55	Persen	0	0
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra				
[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	2,8	Persen	0	0
[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	1:18	Rasio	0	0
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA				



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	50	Persen	0	0
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Timur				
[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Jawa Timur	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Jawa Timur minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Progress/Kegiatan

Pada triwulan I, indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program masih menunggu terbitnya petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan resmi. Ketiadaan juknis membuat kegiatan belum dapat dijalankan, mengingat juknis memegang peranan penting dalam memberikan arahan mengenai mekanisme, sasaran, serta tata cara pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, BBP Jatim memilih untuk menunda kegiatan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai prosedur, tepat sasaran, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Setelah juknis diterbitkan, kegiatan akan segera dilaksanakan secara terencana untuk mendukung pencapaian target peningkatan kualitas literasi membaca peserta didik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca pada triwulan I belum dapat dilakukan karena petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program belum diterbitkan. Ketiadaan juknis tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan langkah operasional, penetapan sasaran peserta, serta mekanisme kegiatan, sehingga pelaksanaan harus ditunda hingga juknis tersedia.

Strategi/Tindak Lanjut

- **Koordinasi Intensif dengan Pusat**

Melakukan komunikasi aktif dengan unit pusat terkait agar proses penerbitan juknis dapat dipercepat atau setidaknya diperoleh draft sementara sebagai acuan persiapan kegiatan.

- **Penyusunan Rencana Awal**

Menyusun rancangan kegiatan awal yang fleksibel berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, agar ketika juknis terbit, kegiatan dapat segera dijalankan tanpa harus memulai dari awal.

- **Identifikasi Sasaran dan Mitra**

Melakukan pemetaan peserta didik, sekolah, dan mitra pelaksana yang akan terlibat dalam program literasi sehingga pelaksanaan bisa lebih cepat saat juknis sudah tersedia.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- **Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana**

Memberikan orientasi awal kepada tim teknis terkait mekanisme pelaksanaan program literasi, sehingga siap melaksanakan kegiatan segera setelah juknis diterbitkan.

- **Monitoring dan Evaluasi Awal**

Menyiapkan instrumen monitoring serta indikator capaian sejak dini, agar pelaksanaan kegiatan setelah juknis terbit bisa langsung diawasi dan dievaluasi secara terukur.

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Progress/Kegiatan

Pada triwulan ke-1 dilaksanakan beberapa kegiatan berikut.

- Seleksi Penulis dan Ilustrator : 29 Maret—11 April

Didapatkan 197 naskah cerita anak dwibahasa masuk

Setelah dilakukan seleksi, didapatkan:

1. naskah berbahasa Jawa : 136 naskah
2. naskah berbahasa Madura : 27 naskah
3. naskah berbahasa Jawa dialek Using : 10 naskah

sisanya tdk memenuhi kualitas.

- Pengumuman naskah lolos : 14 April 2025

Naskah lolos sebanyak 16, terdiri atas 10 berbahasa Jawa, 4 berbahasa Madura, dan 2 berbahasa Jawa dialek Using.

Juri penyeleksi naskah yang dilibatkan dalam kegiatan ini telah memiliki kompetensi dalam naskah cerita anak secara nasional. Ilustrator akan diambil dari ilustrator yang sudah pernah bekerja sama dengan BBP Jatim. Hal ini dilakukan dengan membagikan lembar kesediaan dan mengirimkan karya sebagai portofolio.

Kendala/Permasalahan

Untuk saat ini, seleksi hanya dilakukan untuk memenuhi rekomendasi dalam Implementasi Wajib Efisiensi anggaran, yaitu minimal 16 produk naskah cerita anak dwibahasa. Saat ini, masih berjalan sesuai tahapan. Namun jika relaksasi anggaran disetujui, artinya akan ada seleksi naskah tahap 2 untuk menjangkau dan menghasilkan produk sesuai target awal dalam DIPA. Permasalahannya, pelaksanaan tahapannya akan mundur karena tidak dilakukan sejak awal tahun. Padahal, dari tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan tahapan yang dimulai sejak awal tahun saja, finalisasi tetap mundur hingga akhir tahun. Selain itu, belum lagi dengan pengajuan ISBN yang sangat rumit.

Strategi/Tindak Lanjut

- **Optimalisasi Tahap Pertama**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Memastikan seleksi tahap pertama benar-benar menghasilkan minimal 16 naskah berkualitas sesuai rekomendasi efisiensi anggaran.
 - Menetapkan sistem penilaian yang transparan dan terukur untuk menjamin kualitas produk, sehingga apabila relaksasi anggaran tidak disetujui, target minimal tetap tercapai.
- **Antisipasi Relaksasi Anggaran**
 - Menyusun jadwal cadangan untuk seleksi tahap kedua apabila relaksasi anggaran disetujui, dengan memangkas waktu yang tidak esensial tanpa mengurangi kualitas seleksi.
 - Menyiapkan tim kurasi tambahan untuk mempercepat proses seleksi naskah di tahap kedua.
- **Percepatan Mekanisme Kerja**
 - Menggunakan sistem digital dalam proses seleksi (unggah naskah, penilaian, hingga komunikasi dengan penulis) untuk menghemat waktu.
 - Menjalin kerja sama dengan editor dan kurator eksternal yang berpengalaman agar tahapan penyuntingan berjalan lebih efisien.
- **Mitigasi Keterlambatan Finalisasi**
 - Menetapkan timeline internal yang lebih ketat dibandingkan jadwal resmi, sehingga ada ruang cadangan untuk antisipasi keterlambatan di akhir tahun.
 - Melakukan monitoring mingguan atas progres penyuntingan dan ilustrasi untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir.
- **Strategi Pengurusan ISBN**
 - Membentuk tim khusus yang fokus pada pengurusan ISBN sejak awal, tidak menunggu seluruh naskah selesai.
 - Mengajukan ISBN secara paralel per batch naskah yang sudah siap, sehingga proses penerbitan tidak terhambat menunggu keseluruhan produk selesai.
 - Menjalin komunikasi intensif dengan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga penerbit ISBN untuk memperoleh jalur percepatan.

[SK 2] Meningkatkan Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Progress/Kegiatan

Pada triwulan ke-1 dilaksanakan beberapa kegiatan berikut.

- Koordinasi Pelaksanaan UKBI di Wilayah Mojokerto, tanggal 25—26 Februari 2025
- Sosialisasi UKBI bagi pemangku kepentingan di wilayah Mojokerto secara daring, tanggal 18 Maret 2025, peserta 90 orang Kepala Sekolah dan guru
- Pendampingan dan Pelaksanaan UKBI bagi Pemangku Kepentingan di Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 Maret 2025.
- Hingga triwulan I, lapora jumlah peserta uji yang didapat masih sampai bulan Februari, yaitu sebanyak 3.294 peuji dan PNBP sebesar Rp18.100.000,00.
- Progres saat ini adalah melakukan persiapan kegiatan koordinasi dan sosialisasi UKBI di kota Gresik dan penyelesaian administrasi kelengkapan kegiatan.

Kendala/Permasalahan

- Pendampingan dilaksanakan luring, tetapi pengujian tidak bisa terlaksana karena jaringan internet sehingga dijadwalkan ulang untuk dilaksanakan pada hari yang berbeda. Dengan begitu, pada saat kegiatan itu hanya bisa dilaksanakan simulasi UKBI saja.
- Pemahaman peserta agak kurang jika dibandingkan dg kegiatan luring sehingga banyak kendala peserta yg mendaftar dan pengujian. Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi yang dilakukan adalah membuat grup obrolan untuk koordinasi di luar kegiatan. Dengan begitu, semua pertanyaan dan kendala dapat disampaikan dan dijawab oleh Tim KKLP UKBI.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Kendala: Pengujian Tidak Terlaksana karena Jaringan Internet

Strategi:

- Menyusun rencana cadangan untuk setiap lokasi kegiatan, termasuk menyiapkan perangkat modem portable atau backup jaringan (misalnya bekerja sama dengan penyedia layanan internet lokal).
- Menjadwalkan ulang pengujian secara cepat dan terkoordinasi, dengan memastikan peserta mendapatkan pemberitahuan resmi dan tidak dirugikan.
- Mengoptimalkan kegiatan simulasi UKBI agar peserta tetap mendapatkan gambaran pengalaman uji, sehingga penundaan tidak menurunkan motivasi mereka.

2. Kendala: Pemahaman Peserta Kurang dalam Kegiatan Daring

Strategi:

- Membuat grup obrolan resmi (*WhatsApp*) sebagai saluran komunikasi pasca kegiatan, sehingga peserta dapat bertanya langsung dan mendapatkan jawaban dari Tim KKLP UKBI.
- Menyediakan materi pendukung digital (panduan pendaftaran, FAQ, video tutorial) agar peserta bisa belajar secara mandiri.
- Menugaskan tim khusus yang bertugas merespons kendala teknis pendaftaran maupun uji daring secara cepat.
- Melakukan sesi tindak lanjut secara daring dengan jadwal fleksibel untuk mengulang atau memperdalam materi yang kurang dipahami peserta.

3. Strategi Jangka Panjang

- Melakukan survey kebutuhan peserta di setiap akhir kegiatan untuk mengetahui kendala utama, baik teknis maupun pemahaman, lalu digunakan sebagai bahan perbaikan kegiatan selanjutnya.
- Menjalin kerja sama dengan sekolah/lembaga penyelenggara untuk menyediakan sarana prasarana minimal (ruang komputer dengan jaringan stabil) jika pengujian dilaksanakan luring.
- Menyusun modul pelatihan UKBI yang lebih sederhana dan interaktif, sehingga peserta bisa



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

memahami meskipun dilakukan secara daring.

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia **[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya**

Progress/Kegiatan

Pada triwulan 1, dilakukan kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru Non-Bahasa di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17–22 Maret 2025. Kegiatan ini diikuti secara daring sebanyak 75 peserta. Kegiatan ini adalah tahap teoretis (sinkronus) dan akan berlanjut ke tahap praktik (asinkronus) yang akan berlangsung pada bulan April–Mei, serta UKBI pada tahap akhir. Untuk tahap praktis dilaksanakan melalui *Google Classroom*. Kegiatan pelatihan ini meliputi berbagai aspek berbahasa, seperti tata bahasa dan keterampilan dalam menulis esai.

Kendala/Permasalahan

Perangkat dan keterbatasan media dari peserta kegiatan sehingga tidak dapat menggunakan akun google classroom. Pengumpulan tugas juga terlambat, dari 75 baru terkumpul 61 orang.

Strategi/Tindak Lanjut

- Menyediakan alternatif media yang lebih ringan dan mudah diakses (misalnya WhatsApp Group, Telegram Channel, atau Google Drive terbuka) sebagai kanal pendukung.
- Menyusun panduan penggunaan *Google Classroom* dalam bentuk video/tutorial singkat agar peserta lebih mudah memahami teknis penggunaannya.
- Memberikan opsi akses gabungan: peserta yang memiliki keterbatasan perangkat tetap bisa mengirimkan tugas melalui email/WA, lalu admin mengunggah ke Google Classroom untuk pencatatan resmi.
- Menerapkan batas waktu fleksibel dengan periode tambahan (grace period) agar peserta yang terkendala teknis tetap bisa menyelesaikan tugas.
- Membentuk tim monitoring tugas yang secara aktif mengingatkan peserta melalui grup komunikasi sebelum batas waktu pengumpulan.
- Memberikan sistem apresiasi atau insentif kecil bagi peserta yang disiplin mengumpulkan tugas tepat waktu, sehingga dapat memotivasi yang lain.
- Mencatat peserta yang terlambat untuk dilakukan pendampingan khusus agar hambatan teknis maupun nonteknis bisa segera diatasi.

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

Progress/Kegiatan

Pada triwulan pertama tahun 2025, kegiatan dalam indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya belum dapat dilaksanakan. Kondisi ini disebabkan oleh status anggaran pada rincian output (RO) Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan yang masih diblokir sehingga belum dapat digunakan. Blokir anggaran tersebut berdampak langsung terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan, mengingat kegiatan pembinaan lembaga sangat membutuhkan dukungan pendanaan untuk tahapan sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring. Walaupun demikian, tim kerja Pembahu tetap melakukan persiapan awal, seperti pemetaan lembaga sasaran dan penyusunan rancangan jadwal kegiatan, agar setelah blokir anggaran dicabut, program dapat segera dijalankan tanpa penundaan lebih lanjut. Dengan langkah antisipatif tersebut, diharapkan target peningkatan kualitas penggunaan bahasa di lembaga terbina tetap dapat tercapai sesuai yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2025.

Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya pada triwulan pertama belum dapat berjalan karena anggaran pada RO Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan masih dalam status blokir. Kondisi ini mengakibatkan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi, fasilitasi, hingga monitoring, tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Keterlambatan pencairan anggaran berpotensi menumpuknya kegiatan pada triwulan berikutnya dan menyulitkan pencapaian target akhir tahun apabila tidak segera ditangani.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi dengan Pusat/Atasan

- Melakukan komunikasi intensif dengan unit eselon I terkait agar blokir anggaran segera dicabut atau dilakukan revisi sesuai kebutuhan program.
- Mengajukan laporan resmi tentang urgensi kegiatan dan dampak penundaan terhadap pencapaian target kinerja tahun berjalan.

2. Persiapan Awal Tanpa Anggaran

- Melaksanakan pemetaan lembaga sasaran, identifikasi kebutuhan, dan penyusunan jadwal kegiatan secara administratif sehingga siap dilaksanakan segera setelah anggaran dibuka.
- Membuat daftar prioritas lembaga yang harus difasilitasi terlebih dahulu agar waktu pelaksanaan lebih efisien.

3. Efisiensi Waktu Pelaksanaan

- Menyusun rencana kerja percepatan dengan memangkas waktu non-esensial, misalnya melalui penggabungan beberapa tahapan kegiatan.
- Mengoptimalkan metode hibrida (daring-luring) agar kegiatan bisa menjangkau lebih banyak lembaga tanpa terbatas oleh waktu.

4. Mitigasi Risiko Keterlambatan

- Membentuk tim monitoring khusus yang bertugas memastikan kegiatan berjalan sesuai timeline baru pascabuka blokir.
- Menyusun skenario cadangan untuk mengantisipasi jika blokir anggaran dicabut lebih lambat dari perkiraan.

5. Strategi Jangka Panjang

- Mengusulkan perencanaan anggaran lebih matang pada tahun berikutnya dengan mengantisipasi kemungkinan blokir sejak awal.
- Membuat pendekatan lebih awal dengan lembaga sasaran agar mereka siap mengikuti kegiatan meskipun jadwalnya mengalami pergeseran.

[SK 3] Meningkatkan Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Progress/Kegiatan

Anggaran efektif yang tersedia dalam RO Komunitas Penggerak Literasi Terbina adalah sebanyak



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Rp25.000.000,00. Dengan anggaran tersebut, tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, Kepala dan Tim Kerja menjadwalkan semua kegiatan dalam RO ini pada triwulan ke-2 dengan harapan anggaran relaksasi disetujui oleh DJA. Kegiatan dalam waktu dekat ini adalah Bimtek Literasi yang akan dilaksanakan pada 28–30 April 2025. Peserta kegiatan berasal dari penyelenggara perpustakaan tingkat sekolah.

Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan pada RO Komunitas Penggerak Literasi Terbina menghadapi keterbatasan anggaran karena dana efektif yang tersedia hanya sebesar Rp25.000.000,00. Jumlah anggaran tersebut tidak memadai untuk mendukung berbagai program yang telah direncanakan sepanjang tahun, sehingga ruang lingkup kegiatan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini mendorong Kepala dan Tim Kerja untuk menjadwalkan seluruh kegiatan pada triwulan II dengan harapan adanya persetujuan relaksasi anggaran dari DJA. Namun, strategi ini memiliki risiko penumpukan kegiatan dalam satu triwulan dan potensi keterlambatan capaian target kinerja apabila relaksasi anggaran tidak segera disetujui.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Optimalisasi Anggaran yang Ada

- Memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada capaian kinerja, seperti Bimtek Literasi bagi penyelenggara perpustakaan sekolah.
- Menyederhanakan mekanisme kegiatan (misalnya jumlah hari, materi, atau peserta) agar tetap terlaksana meskipun dengan dana terbatas.

2. Antisipasi Relaksasi Anggaran

- Menyusun rencana cadangan berupa daftar kegiatan tambahan yang siap dilaksanakan segera setelah relaksasi anggaran disetujui oleh DJA.
- Membagi jadwal kegiatan agar tidak seluruhnya menumpuk di triwulan II, dengan memperhatikan ketersediaan waktu, tenaga, dan kualitas pelaksanaan.

3. Efisiensi Pelaksanaan

- Menggunakan metode hibrida (daring dan luring) untuk mengurangi biaya logistik tanpa mengurangi jangkauan peserta.
- Memanfaatkan fasilitas mitra (sekolah, perpustakaan, komunitas) sebagai tempat kegiatan untuk menghemat biaya sewa sarana.

4. Penguatan Kolaborasi

- Menggandeng mitra kerja (dinas pendidikan, komunitas literasi, atau sponsor lokal) guna mendukung penyediaan sarana, prasarana, atau konsumsi kegiatan.
- Mengoptimalkan jejaring alumni kegiatan sebelumnya untuk mendukung pelaksanaan dengan biaya minimal.

5. Monitoring dan Evaluasi

- Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas kinerja meskipun anggaran terbatas.
- Mengevaluasi efektivitas kegiatan secara berkala agar hasilnya tetap berkualitas walaupun lingkup kegiatan lebih kecil.

[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Progress/Kegiatan

Pada triwulan ke-1 dilaksanakan beberapa kegiatan berikut.

- Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah di Kota Ngawi pada tanggal 25—29 Februari 2025. Pada tahun ini, Pusbanglin tidak memberikan target jumlah kosa kata yang diusulkan, tetapi hanya membatasi jumlah minimal yang diajukan, yaitu sebanyak 100 kosa kata bahasa daerah. Tim KKL Perkamusa dan Peristilahan BBP Jatim menargetkan untuk mempersiapkan 250 kosakata usulan. Saat ini telah dilakukan analisis pada 100 entri yang terkumpul.
- Persiapan berkas administrasi kelengkapan kegiatan untuk pengambilan data kamus di Kabupaten Bangkalan pada tanggal 21—25 April 2025

Kendala/Permasalahan

Kosakata bahasa Jawa sejauh ini telah banyak terakomodasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kondisi tersebut membawa konsekuensi bahwa data kosakata baru yang dapat dihimpun dari tahun ke tahun semakin bersifat unik, khusus, dan beragam bentuknya. Hal ini berbeda dengan tahap awal, ketika kosakata yang dihimpun masih bersifat umum dan relatif mudah ditemukan dalam penggunaan sehari-hari. Dengan semakin terbatasnya kosakata baru yang belum terdokumentasi, proses pencarian dan pengumpulan data menuntut usaha yang lebih giat, sistematis, dan teliti dari tim pelaksana. Tim tidak hanya perlu menelusuri penggunaan bahasa dalam konteks percakapan sehari-hari, tetapi juga menggali sumber-sumber tradisional, naskah lama, serta ragam bahasa daerah yang jarang dipakai. Tantangan ini sekaligus mendorong tim untuk memperkuat kerja sama dengan penutur asli, komunitas budaya, dan akademisi, sehingga kosakata yang diperoleh benar-benar mewakili kekayaan dan keragaman bahasa Jawa. Dengan demikian, setiap data yang berhasil dihimpun tidak hanya menambah khazanah kosakata, tetapi juga memperkaya dokumentasi bahasa secara berkelanjutan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penyusunan Kerangka Kajian yang Jelas

- Menetapkan fokus penelitian/kegiatan secara spesifik agar pencarian literatur lebih terarah.
- Membuat daftar kata kunci dan topik utama yang relevan untuk mempersempit ruang lingkup kajian pustaka.

2. Manajemen Sumber Data

- Menggunakan aplikasi Gdrive untuk menyimpan, mengelola, dan mengutip literatur secara efisien.
- Mengklasifikasikan literatur berdasarkan kategori (misalnya: jurnal internasional, jurnal nasional, buku, laporan penelitian, kebijakan pemerintah).

3. Prioritas Sumber yang Kredibel

- Mengutamakan literatur terbaru (5-10 tahun terakhir) dan sumber yang diakui secara akademis (jurnal terindeks, laporan lembaga resmi).
- Melakukan *cross-check* antar sumber untuk memastikan validitas data.

4. Efisiensi Waktu Pengumpulan Data

- Menyusun timeline pengumpulan data pustaka agar tidak memakan waktu terlalu lama.
- Membagi tugas pencarian literatur di antara anggota tim sesuai tema atau subtopik tertentu.

5. Pengayaan Data

- Melengkapi kajian pustaka dengan data sekunder lain seperti laporan kegiatan, arsip kebijakan, atau



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

hasil survei terdahulu agar analisis lebih komprehensif.

- Melakukan *desk study* rutin untuk mengidentifikasi perkembangan terbaru pada isu yang sedang dikaji.

6. Strategi Jangka Panjang

- Membuat *repository* internal berisi literatur yang sudah pernah dipakai agar dapat dimanfaatkan kembali di kegiatan berikutnya.
- Menjalin kerja sama dengan perpustakaan universitas, lembaga penelitian, atau komunitas akademik untuk memperluas akses sumber literatur.

[SK 5] Meningkatkan Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Progress/Kegiatan

Pada triwulan pertama ini, anggaran yang dialokasikan dalam Rincian Output (RO) ini sepenuhnya berada dalam status blokir sehingga tidak dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, target kinerja yang tercantum dalam RO ini tetap harus dicapai, yaitu 1 dokumen sebagai keluaran utama.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bersama Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa (Pusbanglin) direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret sebagai salah satu agenda strategis dalam rangka mendukung program pemetaan bahasa. Kegiatan ini menjadi penting karena akan menjadi wadah koordinasi, sinkronisasi, serta penyamaan persepsi antara Balai Bahasa dengan Pusbanglin terkait teknis pelaksanaan pemetaan. Sejalan dengan itu, proses pengambilan data lapangan baru akan dilakukan setelah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemetaan Bahasa yang diselenggarakan oleh Pusbanglin. Bimtek tersebut berfungsi untuk memberikan bekal metodologis, pengetahuan teknis, serta keterampilan praktis kepada para pelaksana pemetaan, sehingga data yang dihimpun nantinya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan adanya tahapan ini, diharapkan pelaksanaan pengambilan data dapat berjalan lebih sistematis, valid, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Keterpaduan antara kegiatan DKT dan Bimtek Pemetaan Bahasa menjadi langkah awal yang krusial dalam memastikan kegiatan pemetaan bahasa dapat terlaksana secara efektif dan menghasilkan keluaran yang bermanfaat untuk pelindungan serta pengembangan bahasa di Indonesia.

Kendala/Permasalahan

1. Blokir Anggaran

Anggaran dalam Rincian Output (RO) masih sepenuhnya dalam status blokir pada triwulan pertama sehingga tidak dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Hal ini berpotensi menunda aktivitas teknis, padahal target kinerja berupa penyusunan 1 dokumen tetap harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kinerja.

2. Ketergantungan pada Pusbanglin

Pelaksanaan kegiatan pemetaan bahasa sangat bergantung pada jadwal dan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Pusbanglin. Jika Bimtek mengalami keterlambatan, maka proses pengambilan data lapangan pun akan tertunda.

3. Potensi Penumpukan Jadwal

Dengan DKT direncanakan baru berlangsung pada bulan Maret dan pengambilan data dilakukan setelah Bimtek, terdapat risiko keterlambatan tahapan selanjutnya. Hal ini berpotensi menumpuk kegiatan pada triwulan berikutnya dan mengganggu efektivitas pencapaian target akhir tahun.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

4. Kualitas dan Validitas Data

Karena proses pengambilan data bergantung pada kesiapan hasil Bimtek, terdapat risiko bila peserta belum menguasai metode sepenuhnya. Hal ini dapat memengaruhi kualitas, validitas, dan kelengkapan data yang dihimpun untuk kebutuhan pemetaan bahasa.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Permasalahan: Blokir Anggaran

Strategi:

- Melakukan koordinasi intensif dengan unit eselon I/DJA terkait percepatan pembukaan blokir anggaran.
- Menyusun persiapan non-anggaran (draft dokumen, pemetaan lembaga sasaran, jadwal kegiatan) sehingga kegiatan bisa langsung berjalan setelah blokir dibuka.
- Mengoptimalkan sumber daya internal untuk sementara agar target dokumen tetap bisa dihasilkan tanpa menunggu realisasi anggaran.

2. Permasalahan: Ketergantungan pada Pusbanglin

Strategi:

- Membangun komunikasi intensif dengan Pusbanglin terkait jadwal Bimtek agar sinkron dengan agenda DKT dan pengambilan data.
- Menyiapkan tim internal untuk menerima materi Bimtek lebih awal (jika memungkinkan) sehingga bisa mempercepat persiapan lapangan.
- Membuat mekanisme tindak lanjut Bimtek berupa coaching clinic atau diskusi internal agar pemahaman peserta lebih matang sebelum pengambilan data.

3. Permasalahan: Potensi Penumpukan Jadwal

Strategi:

- Membuat timeline cadangan untuk memecah kegiatan ke dalam beberapa tahap, sehingga tidak seluruhnya menumpuk di triwulan berikutnya.
- Menyusun prioritas pengambilan data di wilayah/lokasi tertentu terlebih dahulu agar target minimal tetap tercapai meskipun waktu terbatas.
- Menggunakan metode hibrida (luring-daring) dalam koordinasi dan pelaporan agar efisiensi waktu lebih terjaga.

[SK 5] Meningkatkan Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Progress/Kegiatan

Pada triwulan ke-1 dilaksanakan kegiatan Audiensi dalam Rangka Koordinasi dengan 7 Pemerintah Daerah sasaran RBD secara daring pada tanggal 20 Maret 2025. Koordinasi diikuti oleh 100 orang dalam ruang virtual. Mereka terdiri atas para pemangku kepentingan, maestro, budayawan, dan guru yang akan berperan dalam pengimbasan revitalisasi bahasa daerah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Dr. Dora Amalia. Beliau menegaskan pentingnya peran guru bahasa daerah dalam membangun kesadaran linguistik di kalangan peserta didik dan masyarakat luas. Beliau juga menyoroti strategi pengajaran yang efektif agar bahasa daerah tetap hidup di tengah arus globalisasi yang semakin kuat yang mengakibatkan kepunahan bahasa. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jatim mengapresiasi keterlibatan berbagai dinas pendidikan dalam mendukung program revitalisasi bahasa daerah ini dan mengungkapkan betapa pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Provinsi Jawa Timur.

Kendala/Permasalahan

Pada saat pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi Zoom Meeting, sempat terjadi kendala teknis berupa terputusnya jaringan internet selama kurang lebih sepuluh menit. Gangguan ini diperkirakan disebabkan oleh tingginya beban penggunaan jaringan internet secara bersamaan dalam satu ruangan, mengingat koneksi dipakai oleh banyak perangkat peserta pada waktu yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas jaringan tidak stabil dan akhirnya memengaruhi kelancaran jalannya kegiatan. Meskipun demikian, setelah dilakukan upaya pemulihan jaringan oleh tim teknis, koneksi dapat kembali normal sehingga kegiatan dapat dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi panitia penyelenggara agar pada kegiatan berikutnya dilakukan langkah antisipatif, seperti menyiapkan jalur internet cadangan (backup connection), membatasi jumlah perangkat yang terhubung dalam satu jaringan utama, atau memanfaatkan layanan pendukung seperti mobile hotspot untuk mengurangi kepadatan lalu lintas data. Dengan demikian, gangguan serupa dapat diminimalkan dan jalannya kegiatan daring dapat berlangsung lebih lancar dan efektif.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penyediaan Infrastruktur Pendukung

- Menyediakan jaringan cadangan, misalnya modem portable, jaringan Wi-Fi tambahan, atau mobile hotspot dari penyedia layanan berbeda.
- Menggunakan perangkat router dengan kapasitas besar agar mampu menampung banyak pengguna secara bersamaan tanpa menurunkan kualitas jaringan.

2. Manajemen Penggunaan Internet

- Membatasi jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan utama selama kegiatan berlangsung, hanya diprioritaskan untuk keperluan kegiatan Zoom.
- Mengimbau peserta untuk menonaktifkan aplikasi lain yang memakan bandwidth tinggi (misalnya streaming atau download) selama kegiatan berlangsung.

3. Teknis Pelaksanaan Kegiatan

- Membagi peserta ke dalam beberapa ruangan jaringan (misalnya memanfaatkan Wi-Fi tambahan) jika kegiatan dilakukan secara berkelompok dalam satu lokasi.
- Menyediakan versi rekaman Zoom agar peserta yang sempat terputus tetap bisa mengikuti kegiatan.

[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA

[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)

Progress/Kegiatan

Pada triwulan pertama, kegiatan yang dilaksanakan berfokus pada koordinasi dengan calon narasumber yang akan terlibat dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengajar BIPA. Koordinasi ini menjadi tahap penting untuk memastikan kesesuaian materi, kesiapan teknis, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada triwulan kedua, tepatnya pada bulan Mei 2025. Bimtek tersebut pada prinsipnya direncanakan untuk dilaksanakan secara daring, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada pada tahun berjalan. Namun, apabila terdapat persetujuan relaksasi anggaran, opsi untuk menyelenggarakan kegiatan secara luring tetap terbuka, sehingga cakupan interaksi dan efektivitas pelatihan dapat lebih optimal. Dengan fleksibilitas ini, diharapkan kegiatan dapat menyesuaikan kondisi keuangan tanpa mengurangi kualitas hasil yang ingin dicapai.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Selain mempersiapkan Bimtek, Tim Kerja BIPA juga menyiapkan pelaksanaan program unggulan yang telah menjadi agenda rutin selama dua tahun terakhir, yaitu Lomba bagi Pemelajar BIPA. Program lomba ini dinilai sangat bermanfaat karena dapat mendorong motivasi pemelajar asing dalam meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia, sekaligus menjadi sarana promosi budaya Indonesia di tingkat internasional. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai bentuk apresiasi terhadap pemelajar BIPA yang menunjukkan prestasi, sehingga mampu menumbuhkan semangat kompetitif yang sehat sekaligus memperkuat daya tarik pembelajaran BIPA.

Dengan demikian, meskipun pada triwulan pertama kegiatan inti belum dilaksanakan secara penuh, tahapan koordinasi dan persiapan yang dilakukan menjadi pondasi penting untuk memastikan seluruh agenda pada triwulan berikutnya berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak nyata bagi penguatan program BIPA.

Kendala/Permasalahan

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program KKLK BIPA (Kelompok Kerja Layanan Profesional BIPA) pada tahun berjalan adalah keterbatasan anggaran. Anggaran efektif yang tersedia hanya sebesar Rp18.000.000,00, jumlah yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan kebutuhan riil kegiatan pengembangan dan fasilitasi program BIPA.

Dengan anggaran yang terbatas tersebut, ruang lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan menjadi sangat terbatas. Beberapa rencana strategis, seperti penyelenggaraan bimbingan teknis, fasilitasi lembaga penyelenggara, hingga pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal, harus disesuaikan kembali dengan prioritas yang paling mendesak. Akibatnya, sebagian program hanya dapat dilaksanakan dalam skala kecil, sementara beberapa kegiatan lain berpotensi tertunda atau dialihkan ke tahun berikutnya.

Keterbatasan ini juga berimplikasi pada model pelaksanaan kegiatan. Misalnya, kegiatan yang idealnya dilakukan secara luring untuk memberikan interaksi yang lebih intensif, harus digeser ke moda daring agar biaya operasional dapat ditekan. Kondisi tersebut tentu berdampak pada kualitas interaksi dan jangkauan fasilitasi yang diberikan kepada pengajar maupun pemelajar BIPA.

Meskipun demikian, tim pelaksana tetap berupaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada dengan menyusun prioritas kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Selain itu, strategi efisiensi, kolaborasi dengan lembaga mitra, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi alternatif solusi agar kegiatan BIPA tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Optimalisasi Anggaran yang Tersedia

- Menyusun prioritas kegiatan yang langsung mendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK), seperti fasilitasi lembaga BIPA dan penguatan kompetensi pengajar.
- Menyesuaikan skala kegiatan, misalnya mengurangi jumlah hari atau jumlah peserta, tanpa mengurangi substansi materi.
- Mengalihkan kegiatan luring yang membutuhkan biaya besar menjadi kegiatan daring untuk menghemat anggaran.

2. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

- Menggunakan fasilitas internal atau milik mitra (sekolah/universitas/lembaga) sebagai tempat kegiatan untuk mengurangi biaya sewa sarana.
- Mengoptimalkan teknologi gratis/berbiaya rendah (Zoom dengan paket terbatas, Google Meet, atau platform daring lain) untuk pelatihan dan koordinasi.
- Membentuk tim kerja kecil yang lebih fokus agar biaya operasional dapat ditekan.

3. Kolaborasi dan Kemitraan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penyelenggara BIPA, dan komunitas bahasa untuk berbagi sumber daya

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

- Mengembangkan bahan ajar digital sederhana yang dapat disebarluaskan secara daring, sehingga lebih hemat dibandingkan mencetak modul fisik.
- Menggunakan media sosial dan platform komunikasi daring sebagai saluran promosi serta sosialisasi program tanpa biaya tambahan.

5. Strategi Jangka Panjang

- Mengusulkan penambahan anggaran pada tahun berikutnya dengan argumentasi berbasis capaian dan kebutuhan riil program BIPA.
- Menyusun laporan capaian dengan menekankan efektivitas penggunaan anggaran terbatas, agar menjadi dasar kuat dalam advokasi penambahan dana.
- Mengembangkan program kolaboratif lintas KKLP atau dengan Balai/Unit lain untuk berbagi biaya kegiatan.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Timur

[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Jawa Timur

Progress/Kegiatan

Pada triwulan I tahun 2025, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diperoleh Balai adalah sebesar 100. Nilai tersebut menunjukkan kategori kinerja yang sangat baik. Namun demikian, capaian ini sesungguhnya bukan sepenuhnya mencerminkan optimalisasi pelaksanaan anggaran di lapangan. Nilai tersebut merupakan bentuk kompensasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang diberikan karena sebagian besar anggaran masih dalam kondisi terblokir, sehingga realisasi kegiatan belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, meskipun nilai IKPA berada pada angka maksimal, hal ini perlu dipahami dalam konteks bahwa capaian tersebut lebih disebabkan oleh faktor teknis kebijakan anggaran daripada hasil pelaksanaan kegiatan yang optimal. Oleh karena itu, pada triwulan berikutnya, upaya percepatan realisasi anggaran setelah blokir dicabut menjadi sangat penting agar nilai IKPA yang tinggi benar-benar sejalan dengan kinerja pelaksanaan program yang riil di lapangan.

Kendala/Permasalahan

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi pada triwulan pertama adalah terkait serapan anggaran. Realisasi anggaran diperkirakan sulit untuk mencapai target sesuai ketentuan dalam Perdirjen Perbendaharaan, yang menetapkan capaian serapan per triwulan. Hambatan ini terjadi karena adanya blokir anggaran pada beberapa rincian output, sehingga dana belum dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut membuat proses penyerapan anggaran tidak berjalan sesuai rencana, dan berpotensi menimbulkan deviasi terhadap target serapan triwulan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga belum dapat berjalan secara optimal. Beberapa program yang telah direncanakan harus ditunda menunggu pencairan atau relaksasi anggaran, sementara kegiatan yang berjalan hanya terbatas pada tahap persiapan, koordinasi, dan administrasi. Dampak dari kondisi ini adalah tertundanya capaian output yang seharusnya mulai terlihat sejak triwulan pertama, serta adanya potensi penumpukan kegiatan pada triwulan berikutnya yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan dan kualitas hasil yang diharapkan.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. Percepatan Koordinasi Anggaran

- Melakukan komunikasi intensif dengan unit eselon I terkait percepatan pembukaan blokir anggaran.

2. Optimalisasi Persiapan Kegiatan

- Menyelesaikan seluruh dokumen administrasi, pemetaan sasaran, dan rancangan teknis kegiatan pada periode blokir, sehingga ketika anggaran dibuka, kegiatan dapat segera dilaksanakan tanpa penundaan.
- Menetapkan daftar prioritas kegiatan yang harus segera dilaksanakan pasca pencabutan blokir.

3. Manajemen Waktu dan Target Serapan

- Membuat timeline alternatif yang lebih padat namun realistis untuk mengejar ketertinggalan serapan pada triwulan berikutnya.
- Mengatur ulang distribusi kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun, dengan cara melaksanakan beberapa kegiatan secara paralel.

4. Efisiensi dan Inovasi Pelaksanaan

- Mengoptimalkan metode hibrida (daring dan luring) untuk menghemat waktu dan biaya tanpa mengurangi kualitas kegiatan.
- Memanfaatkan sumber daya internal dan jejaring mitra untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan biaya minimal.

5. Strategi Jangka Panjang

- Menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya dengan antisipasi kemungkinan blokir, termasuk menyiapkan kegiatan non-anggaran atau berbasis kolaborasi.
- Membuat pendekatan awal dengan mitra dan lembaga sasaran agar mereka siap mengikuti kegiatan meskipun jadwal pelaksanaan mengalami perubahan.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Timur

[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Jawa Timur minimal A

Progress/Kegiatan

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2025 mengalami perbedaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut terjadi karena hingga awal tahun 2025, dokumen Rencana Strategis (Renstra) belum tersedia. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang semestinya menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan dan pengukuran kinerja sejak awal tahun anggaran.

Dengan belum tersedianya dokumen Renstra tersebut, kegiatan yang dapat dilaksanakan pada triwulan pertama terbatas pada rapat evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) tahun sebelumnya serta sosialisasi program tahun 2025. Melalui rapat evaluasi, dilakukan peninjauan terhadap capaian, kendala, serta tindak lanjut dari pelaksanaan program di tahun sebelumnya. Sementara itu, sosialisasi program 2025 menjadi sarana untuk menyampaikan arah kebijakan, prioritas, serta rencana kegiatan yang akan dijalankan sepanjang tahun.

Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi langkah awal yang penting, meskipun belum didukung oleh dokumen perencanaan formal, agar pelaksanaan kinerja tetap memiliki arah yang jelas serta dapat disesuaikan segera setelah Renstra, PK, dan SKP selesai disusun.

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pelaksanaan implementasi SAKIP tahun 2025 menghadapi hambatan karena hingga awal tahun dokumen Rencana Strategis (Renstra) belum tersedia. Akibatnya, penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) belum dapat dilakukan sesuai jadwal. Kondisi ini mengakibatkan arah pelaksanaan kinerja pada triwulan pertama belum memiliki acuan formal yang jelas, sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan terbatas hanya pada rapat evaluasi LAKIN tahun sebelumnya dan sosialisasi program 2025. Keterlambatan ini berpotensi memengaruhi efektivitas perencanaan dan pencapaian target kinerja pada periode berikutnya.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Percepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Melakukan koordinasi intensif dengan unit eselon I terkait percepatan penerbitan Renstra 2025-2029 agar segera dapat dijadikan dasar penyusunan PK dan SKP.

2. Pemanfaatan Triwulan Pertama

- Mengoptimalkan triwulan pertama untuk melakukan rapat evaluasi LAKIN tahun sebelumnya sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra dan PK.
- Menyelenggarakan sosialisasi program 2025 agar pegawai memiliki gambaran awal arah kebijakan meskipun dokumen formal belum tersedia.

3. Mitigasi Keterlambatan

- Menyusun timeline percepatan penyusunan PK dan SKP setelah Renstra terbit, sehingga dokumen dapat segera digunakan sebagai dasar kinerja triwulan berikutnya.
- Melakukan penyesuaian target kegiatan agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun akibat keterlambatan perencanaan.

4. Efisiensi dan Sinergi

- Mengintegrasikan hasil evaluasi LAKIN t-1 dengan penyusunan dokumen baru agar tidak terjadi duplikasi kerja.
- Melibatkan seluruh koordinator program sejak awal dalam penyusunan PK dan SKP untuk memastikan keselarasan antarunit.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7569.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Kegiatan	0	2	Rp493.837.000	Rp160.087.660	32.42
2	[DI.7569.QDC.001] Penutur bahasa terbina	Orang	70	215	Rp551.600.000	Rp149.209.669	27.05
3	[DI.7569.QDC.002] Penutur bahasa teruji	Orang	3294	20000	Rp527.650.000	Rp234.162.018	44.38



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
4	[DI.7569.QDC.003] Generasi muda terbina program literasi	Orang	0	200	Rp648.824.000	Rp210.866.759	32.50
5	[DI.7569.QMA.002] Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	dokumen	0	0	Rp145.680.000	Rp66.493.838	45.64
6	[DI.7569.QMA.003] Produk Penerjemahan	dokumen	0	0	Rp2.383.958.000	Rp437.958.000	18.37
7	[DU.7566.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Kegiatan	0	0	Rp790.230.000	Rp4.715.700	0.60
8	[DU.7566.QDC.001] Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	Orang	0	251	Rp1.302.058.000	Rp899.268.226	69.07
9	[DU.7566.QMA.002] Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	dokumen	0	0	Rp102.090.000	Rp56.016.000	54.87
10	[DU.7567.BDB.001] Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Lembaga	0	40	Rp138.747.000	Rp64.618.000	46.57
11	[DU.7567.BDB.002] Komunitas Pengerak Literasi Terbina	Lembaga	0	11	Rp120.000.000	Rp56.127.913	46.77
12	[DU.7568.QDB.001] Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	0	11	Rp128.109.000	Rp62.256.600	48.60
13	[WA.7613.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp1.815.000	18.15
14	[WA.7613.EBA.958] Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Dokumen	0	0	Rp250.630.000	Rp4.055.700	1.62
15	[WA.7613.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	0	0	Rp87.218.000	Rp16.952.197	19.44



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
16	[WA.7613.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp245.906.000	Rp33.488.905	13.62
17	[WA.7613.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp5.901.077.000	Rp3.567.538.092	60.46
18	[WA.7613.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0	0	Rp203.622.000	Rp1.050.000	0.52
19	[WA.7613.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	0	1	Rp79.032.000	Rp3.100.000	3.92
Total Anggaran					Rp14.110.268.000	Rp6.029.780.277	42.73

D. Rekomendasi Pimpinan

- Seluruh tahapan kegiatan yang terdapat dalam juknis wajib dilaksanakan terlepas dari ketersediaan anggaran pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
- Segera melakukan tindak lanjut evaluasi setiap program untuk melihat capaian, kendala/hambatan, dan strategi mencapai tujuan keberhasilan program dan anggaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
- Perencanaan anggaran pada tahun 2025, khususnya kegiatan bimbingan teknis, bengkel, peningkatan mutu, dan kegiatan sejenis lainnya dilakukan kembali secara luring untuk meningkatkan kualitas output dan outcome keberhasilan dan presentase target dan capaian target PK.
- Kegiatan dengan sasaran khusus seperti BIPA diperlukan koordinaasi dan komunikasi ditingkat pimpinan untuk dapat membangun komitmen keterlibatan dalam program Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Diperlukan pendekatan yang berbeda, yaitu melalui BIPALoka (BIPA dengan fokus pada Buku Saku Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Destinasi Wisata) dalam rangka menggiatkan upaya penginternasionalan Bahasa Indonesia yang menyasar pada desa-desa wisata mitra dan calon mitra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
- Setiap koordinator KKL dan seluruh pegawai wajib mengetahui dan memahami definsi operasional setiap indikator kinerja kegiatan pada PK pimpinan untuk menghindari kesalahan dalam menentukan sasaran kegiatan yang dapat memengaruhi hasil capaian.
- Penyerapan anggaran tetap memperhatikan data pada halaman III DIPA sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi internal seluruh pegawai dalam rangka memperkecil deviasi setiap bulannya. Target daya serap perlu diperhatikan dan tetap menjaga IKPA dan NKA konsisten nilai tinggi.
- Tim Laporan Kinerja segera berkoordinasi untuk menyiapkan draf pengukuran kinerja triwulan satu dengan memperhatikan capaian setiap IKK dengan capaian output pada aplikasi SAKTI.

Surabaya, 25 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai
 Puji Retno Hardiningtyas



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR